

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2024 ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Timur cukup stabil dengan tingkat inflasi regional dan IPH yang rendah. Tingkat inflasi di Kota Mataram (sebagai basis acuan inflasi kota terdekat) cukup stabil hal ini dibarengi dengan tingkat IPH Kabupaten Lombok Timur yang mulai menurun sejak bulan Maret (setelah Lebaran Idul Fitri). Terkendalnya tingkat IPH ini dipengaruhi oleh penurunan harga beras sebagai salah satu komoditas penyumbang IPH karena adanya panen raya padi pada sentra padi di Lombok Timur.

Pada Triwulan I (Januari s.d Maret) 2024 tingkat IPH di Kabupaten Lombok Timur salah satu komoditas yang menyumbang IPH cukup tinggi adalah beras. Namun demikian ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian pada saat musim hujan yaitu : bawang merah dan cabai yang cenderung berkurang pasokannya karena sudah melewati masa tanam dan panen.

Berdasarkan hasil Pemantauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2024 ini, dijadikan sebagai input untuk perhitungan IPH secara berkala. Dari hasil pemantauan harga selama Triwulan II ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur Triwulan II 2024

| April | | | Mei | | | | | Juni | | | |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| M1 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| (3.24) | (3.59) | (3.63) | 0.19 | 0.06 | 0.60 | 0.80 | 1.53 | 1.38 | 0.77 | 0.40 | (0.13) |

Dari Grafik Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Inflasi tersebut diatas rentang IPH IPH Kabupaten Lombok Timur berada pada -3,63 s.d. 1.5, dimana posisi tertinggi IPH terjadi pada minggu V bulan Mei 2024 sebesar 1.53 dan terendah pada minggu IV bulan April sebesar -3.63. Sedangkan Inflasi Propinsi NTB dan Kota Mataram masing-masing sebagai berikut :

- Propinsi NTB Inflasi tertinggi pada bulan April sebesar 3.31 dan terendah pada bulan Juni sebesar 2.12
- Kota Mataram mengalami Inflasi tertinggi pada bulan April sebesar 3.27 dan terendah pada bulan Juni sebesar 2.93

Adapun komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan inflasi di Kabupaten Lombok Timur dan regional NTB, yaitu :

- Bawang Merah
- Bawang Putih
- Cabai
- Minyak Goreng

- Daging Ayam Ras
- Telur Ayam Ras

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan

1. Masih tingginya harga bawang merah, cabe rawit dan beberapa komoditas pertanian lainnya disebabkan karena memasuki pasca tanam sehingga pasokan dari sentra produksi berkurang. Pengaruh cuaca sangat dominan terhadap tanaman hortikultura ini sehingga tingkat produksinya berkurang.
 2. Adanya gejala kenaikan harga minyak goreng curah dan minyak kita di pasaran harus diwaspadai karena sangat bergantung pada DMO (Domestic).
 3. Kenaikan harga pakan menyebabkan harga daging ayam dan telur cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga pada Triwulan I.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Inflasi

1. Konsistensi Penerapan Kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah di barengi dengan beberapa program dari Pemerintah Pusat terutama Dukungan Program Gerakan Tanam Padi, Program Upland Bawang Putih, dan Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi mendukung kebijakan **Program Penguatan Produktivitas Pertanian sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi dan Tetap Menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang rendah.**
 2. **Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani, Peternakan Sapi dan Pengembangan UMKM**
 3. **Optimalisasi Koordinasi TPID**
 - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
 - Penyusunan Neraca Pangan Periodik di Kabupaten Lombok Timur.
 - Operasi Pasar Murah
 - Sidak Pasar
 4. Program Pangan Lestari untuk menggalakkan Gerakan menanam.
 5. **Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Champion Komoditas di tingkat regional (Champion Cabe dan Bawang Merah)**
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Program Penguatan Produktivitas Pertanian.

Dengan adanya Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memberikan peluang perluasan areal tanam dan diversifikasi produk pertanian. Penguatan informasi mengenai jadwal dan jenis komoditas yang akan ditanam oleh petani harus terverifikasi dengan baik, sehingga jumlah dan distribusi pupuk yang diperlukan tersedia tepat waktu dan menyeluruh sampai di Kelompok Tani, sehingga keluhan kelangkaan

pupuk yang sering terjadi dapat dihindarkan

2. Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani, Peternakan dan UMKM

Semakin banyaknya masyarakat baik petani, peternak maupun pelaku usaha terutama UMKM mengakses program ini diperlukan komitmen masyarakat untuk patuh dan taat dalam pengembalian pinjamannya, sehingga Lembaga Pembiayaan sebagai Mitra Pemerintah dalam pelaksanaan Program semakin luas menjangkau masyarakat yang memerlukan pembiayaan dalam usahanya.

3. Optimalisasi Koordinasi TPID

Kegiatan-kegiatan koordinasi di Sekretariat TPID sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya Fasilitasi dan Penguatan Anggaran dari APBD untuk mendukung upaya penanganan intervensi langsung tatkala harga kebutuhan pokok menunjukkan gejala kenaikan harga sehingga dapat diantisipasi dengan cepat.

4. Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam penanganan inflasi

Semakin banyaknya Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah terjalin, memberikan jaminan penguatan pasokan komoditas dimasing-masing daerah dan memberikan peluang bagi daerah lain yang mengalami gangguan pasokan untuk dipasok oleh daerah lainnya yang telah menjalin Kerjasama.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi

1. Monitoring dan Pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi perlu diefektifkan, sehingga penyalahgunaan kuota dan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat memenuhi indikator tepat harga, saran dan tepat waktu.
2. Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu mengikutsertakan asosiasi pedagang pasar dan distributor, sehingga KAD yang dijalin dapat diaplikasi oleh para pelaku pasar di daerah.
3. Penguatan stok padi di daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) perlu diperkuat untuk mengantisipasi kelangkaan pada saat musim kemarau yang akan datang.